

DAFTAR PUSTAKA

- Albarry, D. M, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.
- Amiruddin dan Asikin Z, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman T, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Darusman M, 1996, *Konsepsi Hak-Hak Asasi Manusia (Berdasarkan) Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Halim, Hamzah dan Putera, Kemal Redindo, 2013, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual: Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hoarej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhony, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995, *Definisi Asimilasi*, Jakarta: Balai Pustaka. ISBN: 979-407-182-X.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995, *Definisi Narapidana*, Jakarta: Balai Pustaka. ISBN: 979-407-182-X.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995, *Definisi Pandemi*, Jakarta: Balai Pustaka. ISBN: 979-407-182-X.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koesnoen, R.A, 1961, *Politik Penjara Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Medoeng, S, 2003, *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: PT Perca.
- Meleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Mandar Maju.
- Mertokusumo, S, 2003, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Miles, Mathew B, dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Baru.
- Muladi, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nonet, Phillipe. 2020, *Hukum Reponsif*. Bandung: Nusa Media.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Porta, Miquel, 2008, *A Dictionary of Epidemiology*. USA: Oxford University Press.
- Priyanto, Dwidja dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem PertanggungJawaban Pidana Korporasi (dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranggawijaya, Rojidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Revana, Dey, & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Roeslan, 1985, *Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soemadi Praja, R. Achmad dan Atmasasmita Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Percetakan Ekonomi.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Surbakti Natangsa, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatna, Uyat, 2009, *Kebijakan Publik*. Bandung: Kencana Utama.
- Utrecht, E, 1992, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Widnyana, I Made Adi, 2020, *COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Wuisman, J.J.M, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas Jilid I*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal

- Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)", *Jurnal Hukum UIN* Vol. 3, No. 4, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran (*Covid-19*)", *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis* Vol. 6 No. 1, Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Angkasa Sudigdo, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Anika Prastyowati, "Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit *COVID-19* Sebagai Dasar Upaya untuk Pengembangan Obat Antivirus dan Vaksin, *BioTrends* Vol. 11 No.1 Tahun 2020, Bogor: Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI.

- Bayu Rizky, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No.3, Tahun 2020, Tapanuli Selatan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- David M. Morens, Gregory K. Folkers, Anthony S. Fauci, "What Is a Pandemic?" *Perspective JID* 2009:200 (1 October), Maryland: Office of the Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland.
- Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 Nomor 2 Juni 2017, Jakarta: Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ely Alawiyah, dan Nelly Ulfah, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1 2016-2017, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Yasri.
- Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)", *Legal Spirit* Vol. 4 No.1 2020, Malang: Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.
- Hari Poerwanto, "Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional", *Humaniora* No.12, September-Desember 1999, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Menjadi Korban Overpopulation Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2 No.1, Juni 2019, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti.
- Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)", *Fiat Justisia Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Nurjalal, "Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Terhadap Hak Menguji Undang-Undang", *Jurnal Pahlawan* Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, Riau: Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

- Penny Naluri Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 3, September 2017, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No.1 Januari-Maret 2015, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Rizky Amalia Fajrin, "Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro", *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 2 No.1, Januari: 2015, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Sofia Al Farizi dan Bagus Nuari Harmawan, "Data Transparency and Information Sharing: Coronavirus Prevention Problems in Indonesia", *Jurnal Administrasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 Juni 2020, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suhadi, "Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Perspektif* Vol. XV No. 2 April 2010, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality* Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, Sumatera Utara: Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Taufik H. Simatupang, "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* Vol. 19 No.2, Juni-2019, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum Info Singkat, Vol XII, No. 8/II/Puslit, April 2020, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, 2011, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Vioxei Ananta Putra, Eny Sulistyowati, dan Muh Ali Masnun, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Ruang Lingkup Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia" *NOVUM: JURNAL HUKUM* Vol. 7 No. 2, April 2020, hlm. 59. E-ISSN 2442-4641.
- Waraney C.V. Panungkelan, "Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", *Lex Crimen* Vol.

5 No. 4, April-Juni 2016, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran *Virus Corona Covid-19* di Indonesia”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol.7 No.3, April 2020, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Web dan Berita

Achmad Nasrudin Yahya, 27 April 2020, “Kebijakan Yasonna Laoly Bebaskan 30.000 Napi Berbuntut Gugatan”, tersedia di web <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/05464851/kebijakan-yasonna-laoly-bebaskan-30000-napi-berbuntut-gugatan?page=all#page2>, diakses pada tanggal 16 November 2020, Pukul 20.00 WIB.

Angkasa Sudigjo, “Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana pada Masa Darurat Pandemi Covid-19”, dalam Webinar 09 Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, hlm. 2 & 4.

Ardito Ramadhan, 27 April 2020, “Digugat Soal Asimilasi Napi, Yasonna: Silakan Saja”, tersedia di web <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/21153951/digugat-soal-asimilasi-napi-yasonna-silakan-saja>, diakses pada tanggal 16 November 2020, Pukul 20.15 WIB.

Dani Prabowo, 16 April 2020, “Narasi Menakutkan Usai Napi Bebas Akibat Covid-19 dan Upaya Cegah Kejahatan Berulang”, tersedia di web <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/11053401/narasi-menakutkan-usai-napi-bebas-akibat-covid-19-dan-upaya-cegah-kejahatan>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 02.03 WIB.

Dinda Balqis, 22 April 2020, “Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat”, tersedia di web <https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>, diakses tanggal 12 Juni 2020, Pukul 15.23 WIB.

Direktoral Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan, tersedia di web <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/10>, diakses pada tanggal Minggu 1 November 2020, Pukul 17.45 WIB.

Ditjenpas, 11 Juni 2020, “Data Terakhir Penghuni Per UPT”, tersedia di web <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>, diakses tanggal 11 Juni 2020, Pukul 01.30 WIB.

Haryanti Puspa Sari, Deti Mega Purnamasari, dan Dian Erika Nugraheny, 10 Juni 2020, "UPDATE: Bertambah 1.241, Kini ada 34.316 Kasus Covid-19 di Indonesia", tersedia di web <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/10/15411931/update-bertambah-1241-kini-ada-34316-kasus-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020, Pukul 00.45 WIB.

Heath Kelly, 2011, "*Bulletin of The World Health Organization*", Doi: 10.2471/BLT.11.088815.

Kementerian Dalam Negeri, "Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintahan Daerah Pencegahan, Pengendalian, Daignosis dan Manajemen", hlm. 3-4.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 07 Maret 2020, "Tanya Jawab *Coronavirus Disasese (COVID-19)*- QnA Update 6 Maret 2020", Infeksi Emerging Media Informasi Resmi Tekait Penyakit Infeksi Emerging, tersedia di web <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#.Xy6eoCgzBIU>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2020, Pukul 19.55 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 27 Maret 2020, "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disaese (Covid-19)*", Revisi Ke-5, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat hJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), hlm. 11.

Nanda Perdana Putra, 19 Mei 2020, "Polisi Tangkap 125 Narapidana Asimilasi yang Kembali Berulah". [Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/4258450/polisi-tangkap-125-narapidana-asimilasi-yang-kembali-berulah). Diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/4258450/polisi-tangkap-125-narapidana-asimilasi-yang-kembali-berulah>, diakses tanggal 12 Juni 2020, Pukul 17.02 WIB.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Peta Sebaran, tersedia di web <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Diakses pada hari Minggu 01 November 2020, Pukul 13.32 WIB.

World Health Organization, 2020, "*Health Topics*", tersedia di web https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, diakses pada tanggal 12 Juli 2020, Pukul 20.48 WIB.

World Health Organization, 2020, "*WHO Director-General's Opening Remaks at The Media Briefing On Covid-19- 11 March 2020*", tersedia di web <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening->

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, diakses pada tanggal 07 Agustus 2020, Pukul 16.17 WIB.

Yulida Medistiara, 29 Juni 2020, “Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian”, tersedia di web <https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencurian>, diakses pada tanggal 16 November 2020, Pukul 19.51 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Musyawah Nasional III Persahi pada bulan Desember 1966.